THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

POLICY ASSESSMENT
2025

Efisiensi Anggaran Era Prabowo: Analisis Kekuasaan dan Kepentingan Elite

Felia Primaresti
Manajer Riset dan Program, The Indonesian Institute



Ringkasan Eksekutif

Kebijakan efisiensi anggaran yang diterbitkan melalui Inpres 1/2025 oleh pemerintahan Prabowo-Gibran menandai komitmen terhadap penghematan fiskal, terutama pada belanja seremonial dan non-esensial. Namun, implementasinya menunjukkan ketimpangan serius: sektor strategis seperti pendidikan, riset, dan pembangunan infrastruktur mengalami pemangkasan. Sementara, sektor pertahanan dan lembaga keamanan justru mendapat peningkatan anggaran.

Studi ini menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi tidak disertai definisi, indikator, atau tujuan yang jelas. Hal ini membuat kebijakan rentan digunakan secara lentur dan politis. Menggunakan pendekatan teori *Public Choice*, ditemukan bahwa alokasi anggaran cenderung dipengaruhi oleh kepentingan elite dan kelompok yang dekat dengan kekuasaan. Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dikelola oleh militer, sementara proyek nasional seperti perumahan dan *food estate* banyak melibatkan korporasi besar, dengan partisipasi masyarakat sipil yang minim.

Kelemahan dalam komunikasi publik, tidak konsistennya pemangkasan, serta pengangkatan pejabat khusus di tengah efisiensi menandakan rendahnya akuntabilitas dan arah kebijakan yang tidak berbasis kebutuhan publik. Kebijakan efisiensi justru menjadi selubung untuk konsolidasi kekuasaan melalui patronase fiskal.

Studi ini merekomendasikan penguatan transparansi anggaran melalui *dashboard* publik, reformasi mekanisme transfer fiskal, serta pengawasan yang lebih kuat oleh lembaga audit negara. Tanpa perbaikan mendasar, kebijakan efisiensi berisiko menjauh dari tujuannya dan memperdalam ketimpangan dalam pengelolaan fiskal nasional.

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Jl. HOS. Cokroaminoto No 92, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310
Telepon: +6221 3158032
Email: contact@theindonesianinstitute.com

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif 1
Daftar Isi 2
Daftar Tabel 2
Daftar Singkatan 2
Abstrak 3
Latar Belakang 3
Pertanyaan Penelitian 6
Tinjauan Pustaka 7
Temuan dan Pembahasan 8
Refleksi Kepentingan Politik dalam Kebijakan Efisiensi Anggaran Pemerintahan Prabowo-Gibran 8
Pemetaan Kelompok Kepentingan pada Kebijakan Fiskal Era Pemerintahan Prabowo-Gibran 15
Analisis Pola Patronase Politik Distribusi Anggaran di pemerintahan Prabowo-Gibran 20
Kesimpulan 23
Rekomendasi 24
Daftar Pustaka 25
Profil Penulis 27
Profil Lembaga 28

Daftar Tabel

Tabel 1. Sepuluh Kementerian/Lembaga dengan Alokasi Anggaran Tertinggi dalam APBN 2025
Tabel 2. 11 Program Unggulan Prabowo Subianto Berdasarkan Prioritas (Diurutkan Berdasarkan Program Prioritas)
Tabel 3. Matriks Pemetaan Kelompok Kepentingan Terhadap Kebijakan Fiskal Era Prabowo–Gibran

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH
Jl. HOS. Cokroaminoto No 92, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310
Telepon: +6221 3158032
Email: contact@theindonesianinstitute.com

Daftar Singkatan

3T – Tertinggal, Terdepan, dan Terluar

AD – Angkatan Darat

APBD – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBN – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

AUPB – Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Badan Gizi Nasional – BGN

Badan Pemeriksa Keuangan – BPK

Bappeda DIY – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

BPI – Badan Pengelola Investasi

CEO – Chief Executive Officer

CKG – Cek Kesehatan Gratis

COP29 – Conference of the Parties-29

DAK – Dana Alokasi Khusus

Danantara – Daya Anagata Nusantara

DAU – Dana Alokasi Umum

DBH – Dana Bagi Hasil

DIY – Daerah Istimewa Yogyakarta

DOGE – Department of Government Efficiency

DPR – Dewan Perwakilan Rakyat

DPR RI – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

IKN – Ibu Kota Nusantara

Inpres – Instruksi Presiden

IPC – Indonesian Parliamentary Center

K/L – Kementerian/Lembaga

Kemendikti Saintek – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Kemenhan – Kementerian Pertahanan

Kemenkes – Kementerian Kesehatan

KIM – Koalisi Indonesia Maju

Kodam – Komando Daerah Militer

KSAD – Kepala Staf TNI Angkatan Darat

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH
Jl. HOS. Cokroaminoto No 92, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310
Telepon: +6221 3158032
Email: contact@theindonesianinstitute.com

MBG – Makan Bergizi Gratis

MBR – Masyarakat Berpenghasilan Rendah

MPR RI – Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

OTSUS – Otonomi Khusus

Pemilu – Pemilihan Umum

Perpres – Peraturan Presiden

Polri – Kepolisian Republik Indonesia

PPP – Public Private Partnership

PSN – Proyek Strategis Nasional

PUPR – Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

RPJMN – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

RS – Rumah Sakit

TBC – Tuberkulosis

TII – The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research

TKD – Transfer ke Daerah

TKN – Tim Kampanye Nasional

TNI – Tentara Nasional Indonesia

UMKM – Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

UU – Undang-Undang

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Jl. HOS. Cokroaminoto No 92, Menteng, Kota Jakarta
Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310
Telepon: +6221 3158032
Email: contact@theindonesianinstitute.com

Abstrak

Studi ini mengkaji kebijakan efisiensi anggaran era Prabowo-Gibran dengan teori Public Choice, yang menyoroti kecenderungan pemanfaatan anggaran untuk kepentingan politik dan elite. Dengan menggunakan analisis kualitatif terhadap dokumen, narasi kebijakan, berita, dan wawancara, studi ini menemukan bahwa kebijakan efisiensi cenderung tidak merata, tidak transparan, dan dipengaruhi oleh patronase politik. Fokus belanja negara bergeser ke sektor keamanan dan simbol-simbol kekuasaan, sementara sektor layanan publik mengalami pemangkasan. Studi ini merekomendasikan perlunya transparansi anggaran, reformulasi distribusi fiskal, dan penguatan mekanisme pengawasan untuk memastikan kebijakan fiskal mendukung tata kelola publik yang adil dan efisien.

Efisiensi Anggaran Era Prabowo: Analisis Kekuasaan dan Kepentingan Elite

Felia Primaresti

Latar Belakang

Pada 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Prabowo dalam kapasitasnya sebagai presiden, memiliki kewenangan besar dalam menentukan berbagai arah kebijakan negara. Salah satunya adalah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mengatur efisiensi pengeluaran negara dan dirinci ke dalam beberapa kategori. Dengan kata lain, presiden menginstruksikan pengurangan anggaran di sektor-sektor tertentu.

Dalam hal ini, efisiensi anggaran merupakan hal baik yang perlu dilakukan. Yuliafitri (2024) menunjukkan bahwa efisiensi anggaran perlu dilakukan pemerintah karena terbukti mengurangi pemborosan, mengurangi penyalahgunaan anggaran, serta meningkatkan efektivitas belanja negara. Hal ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 (Inpres 1/2025), yang memberikan instruksi kepada kepala daerah untuk membatasi belanja yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, dan seminar. Namun, poin yang mungkin luput dalam hal ini adalah implikasi bahwa anggaran yang dialokasikan secara efisien akan memengaruhi banyak hal, termasuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH
Jl. HOS. Cokroaminoto No 92, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310
Telepon: +6221 3158032
Email: contact@theindonesianinstitute.com

Selain itu, dalam sistem politik dengan skema multipartai seperti Indonesia, kebijakan anggaran tidak bisa berjalan secara linear, juga tidak bisa sepenuhnya bersifat teknokratis (Schlogl, 2020). Anggaran publik juga merupakan instrumen politik yang dapat digunakan untuk mempertahankan dukungan, memperkuat basis kekuasaan, atau memenuhi tuntutan kelompok tertentu. Dalam konteks teori *Public Choice* misalnya, kebijakan publik, termasuk kebijakan anggaran, sering kali dipengaruhi oleh aktor-aktor politik yang memiliki insentif untuk memaksimalkan kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Secara ringkas, teori *Public Choice* menerapkan metode dan prinsip ekonomi untuk menganalisis perilaku politik, dengan asumsi bahwa individu dalam ranah politik, seperti pemilih, politisi, dan birokrat, bertindak berdasarkan kepentingan pribadi mereka, mirip dengan perilaku individu dalam pasar ekonomi. Pendekatan ini menyoroti bagaimana kepentingan pribadi dapat memengaruhi keputusan kolektif dan kebijakan publik, sering kali menghasilkan kebijakan yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan umum (Mueller, 2003). Dalam konteks politik secara umum, fenomena seperti *logrolling* (saling tukar bantuan dalam politik), patronase politik (balas budi politik), dan intervensi kelompok kepentingan dapat memengaruhi keputusan fiskal, sehingga alokasi anggaran tidak sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan nasional, melainkan pada kepentingan politik jangka pendek.

Lebih jauh, efisiensi anggaran di pemerintahan Prabowo-Gibran juga perlu dikaji dalam kaitannya dengan birokrasi dan elite bisnis. Hal ini mengingat proses penyusunan dan implementasi anggaran sering kali melibatkan berbagai kepentingan, baik dari dalam pemerintahan maupun dari aktor eksternal, seperti dunia usaha dan kelompok kepentingan tertentu. Mengutip Kompas.com (24/2/2025), Prabowo mengungkapkan bahwa dana sebesar Rp300 Triliun hasil efisiensi akan dianggarkan untuk makan bergizi gratis (MBG), juga diinvestasikan di Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk Proyek Nasional. Perlu dicermati bahwa dalam proyek MBG, misalnya, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) turut berperan dalam pembangunan sekitar 300 dapur umum (Tempo, 9/2/2025). Sementara, Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan P. Roeslani, diketahui merangkap jabatan sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi. Selain itu, Rosan juga pernah menjabat sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

Fenomena tersebut jika tidak diawasi dengan baik, dapat membuka ruang bagi kebijakan fiskal yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat, melainkan pada oligarki atau kelompok tertentu

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH
Jl. HOS. Cokroaminoto No 92, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310
Telepon: +6221 3158032
Email: contact@theindonesianinstitute.com

yang memiliki akses terhadap kekuasaan. Oleh karena itu, analisis terhadap pola pemotongan dan alokasi anggaran diharapkan dapat menjelaskan apakah keputusan fiskal di era Prabowo-Gibran mencerminkan prinsip efisiensi atau justru lebih banyak dipengaruhi oleh faktor politik dan ekonomi elite. Oleh karena itu, evaluasi terhadap Inpres 1/2025 tentang efisiensi anggaran di pemerintahan Prabowo menjadi penting untuk memastikan kebijakan fiskal dijalankan secara sesuai dengan prinsip-prinsip perencanaan kebijakan, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Studi ini menggunakan pendekatan teori *Public Choice*, yang menyoroti bagaimana keputusan kolektif dalam kebijakan publik dipengaruhi oleh kepentingan individu dan kelompok, termasuk aktor-aktor dalam pemerintahan dan sektor swasta. Melalui analisis kebijakan, analisis narasi kebijakan, analisis berita, dan wawancara mendalam, penelitian ini mengidentifikasi sejauh mana keputusan anggaran pemerintah didasarkan pada kebutuhan pembangunan atau lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan politik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tata kelola anggaran negara di bawah pemerintahan Prabowo, serta implikasinya terhadap efektivitas kebijakan publik di Indonesia.

Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana efisiensi anggaran di pemerintahan Prabowo-Gibran mencerminkan kepentingan politik?
2. Sejauh mana kekuasaan kelompok kepentingan memengaruhi kebijakan fiskal di era Prabowo-Gibran?
3. Apakah distribusi anggaran di pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan pola patronase politik?
4. Bagaimana strategi kebijakan yang optimal untuk pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dalam konteks efisiensi anggaran?

Tinjauan Pustaka

Dalam ekonomi politik, kebijakan dan tindakan politisi dapat dianalisis melalui Teori Pilihan Publik (*Public Choice Theory*), yang menyoroti peran kepentingan individu (*self-interest*) dalam proses pengambilan keputusan oleh pemangku kebijakan. Chohan (2024) berpendapat bahwa politisi dan birokrat cenderung bertindak rasional untuk mencapai tujuan pribadi mereka dalam sektor publik. Berdasarkan teori ini, keputusan pemerintah pusat dalam menyalurkan

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH
Jl. HOS. Cokroaminoto No 92, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310
Telepon: +6221 3158032
Email: contact@theindonesianinstitute.com

dana ke daerah tidak lepas dari kepentingan pribadi para pemegang kekuasaan, seperti meningkatkan elektabilitas dan memperkuat dukungan politik.

Selain itu, menurut Breton (1993) dalam perkembangan kajian ilmu politik, pendekatan ekonomi terhadap politik, terutama melalui teori *Public Choice*, diperkirakan akan semakin dominan. Fokus kajian tidak lagi semata pada evaluasi normatif dan upaya reformasi kelembagaan, melainkan bergeser ke arah memahami bahwa apa yang dilakukan aktor politik ada alasannya, dan sering kali itu adalah cara paling "masuk akal" atau "efisien" dalam konteks situasi yang mereka hadapi.

Studi ini menjadi masuk akal mengingat Grossman (1994), dalam studinya *A Political Theory of Intergovernmental Grants*, menjelaskan bahwa transfer anggaran antar-pemerintah bisa menjadi alat untuk "membeli" dukungan masyarakat, serta mengamankan sumber daya politik dari pejabat publik atau kelompok kepentingan di daerah tertentu. Ia juga menemukan bahwa kesamaan afiliasi partai politik antara pemerintah pusat dan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap besarnya transfer anggaran per kapita yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Meskipun demikian, dalam melihat sudut pandang dan perilaku aktor politik dalam membuat keputusan, melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014), setidaknya setiap kebijakan dan pemerintahan harus menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Adapun AUPB yang dimaksud mencakup asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.

Metode Penelitian

Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif diterapkan dalam pengumpulan dan analisis dokumen kebijakan, narasi kebijakan, serta wawancara mendalam dengan para ahli. Ahli yang disebutkan di sini adalah Dosen Manajemen dan Kebijakan Publik, Universitas Gadjah Mada dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk mendapatkan perspektif pelaksanaan di daerah.

Fokus analisisnya adalah bagaimana efisiensi anggaran dalam pemerintahan Prabowo-Gibran mencerminkan kepentingan politik. Untuk menjawab pertanyaan mengenai efisiensi anggaran, penelitian ini membandingkan proporsi anggaran antara sektor populis dan sektor strategis,

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH
Jl. HOS. Cokroaminoto No 92, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310
Telepon: +6221 3158032
Email: contact@theindonesianinstitute.com

menelaah perubahan alokasi anggaran sebelum dan sesudah pemilihan umum (pemilu), serta menganalisis narasi kebijakan ekonomi dalam pidato dan dokumen resmi pemerintah.

Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan kedua mengenai sejauh mana kekuasaan kelompok kepentingan memengaruhi kebijakan fiskal di era Prabowo-Gibran, studi ini menggunakan analisis kualitatif dengan beberapa kerangka utama. Analisis dilakukan dengan menelusuri konsentrasi proyek pada kelompok bisnis tertentu, mengidentifikasi perubahan kebijakan fiskal akibat tekanan dari kelompok kepentingan, serta mengeksplorasi hubungan antara pejabat negara dan pelaku bisnis utama.

Terakhir, untuk menjawab pertanyaan ketiga, yakni apakah distribusi anggaran dalam pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan pola patronase politik, studi ini menerapkan analisis dengan melihat pola distribusi anggaran di kementerian secara pada masa pemerintahan Prabowo-Gibran.

Temuan dan Pembahasan

Refleksi Kepentingan Politik dalam Kebijakan Efisiensi Anggaran Pemerintahan Prabowo-Gibran

Bagian ini membahas bagaimana kebijakan efisiensi anggaran di era Prabowo-Gibran berkelindan dengan kepentingan politik. Namun, sebelum membahas hal tersebut dengan lebih mendalam, kebijakan efisiensi anggaran di era Prabowo-Gibran secara umum masih perlu diperkuat dari segi definisi, justifikasi, dan indikator yang jelas. Hal ini perlu dilakukan agar kebijakan yang dikeluarkan dan diimplementasikan bukan hanya dipaksakan untuk memenuhi janji politik atau menguntungkan kepentingan tertentu.

Efisiensi anggaran dalam pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan indikasi kebijakan yang demikian. Sejumlah akademisi, tokoh, dan kelompok masyarakat sipil mengkritik pemotongan anggaran yang dinilai dilakukan secara tidak terstruktur dan kurang mempertimbangkan sektor-sektor strategis yang berperan penting dalam pembangunan. Melansir data dari Indonesian Parliamentary Center (IPC, 2025), tiga kementerian dengan penyumbang efisiensi anggaran terbesar terletak di Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp81,38 Triliun, disusul oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendikti Saintek) sebesar Rp22,54 Triliun, dan yang terakhir adalah Kementerian Kesehatan sebesar Rp19,63 Triliun.

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH
Jl. HOS. Cokroaminoto No 92, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310
Telepon: +6221 3158032
Email: contact@theindonesianinstitute.com

Sementara, menurut data Tempo (10/2/2025), banyak kementerian/lembaga yang dananya tidak dipotong, termasuk Kementerian Pertahanan, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Intelijen Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), hingga Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI). Seiring dengan implementasi kebijakan ini, beberapa lembaga mengalami pemotongan anggaran di tengah pelaksanaannya. Salah satu contohnya adalah Polri, yang mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp20,5 triliun per 12 Februari 2025 (Kumparan, 12/2/2025). Sementara, kementerian/lembaga lain yang sudah disebutkan di atas belum mengalami perubahan kebijakan setidaknya per tulisan ini dibuat.

Di sisi lain, dalam konteks daerah, anggaran Transfer ke Daerah (TKD) juga turut terdampak imbas dari kebijakan ini. Mengutip Kompas.com (5/2/2025), Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memangkas signifikan TKD sebanyak Rp50,59 Triliun (Antara News, 5/2/2025) yang meliputi dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), hingga dana otonomi khusus (otsus).

Jika merujuk pada Inpres 1/2025 sebagai dasar hukum, belum terdapat penjelasan yang secara eksplisit mendefinisikan konsep efisiensi anggaran menurut pemerintahan Prabowo-Gibran, termasuk tujuan spesifik yang ingin dicapai. Padahal, kejelasan definisi ini sangat krusial, karena sebuah kebijakan harus memiliki batasan yang jelas agar tidak menjadi alat justifikasi yang lentur dan rentan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Selain itu, tanpa definisi yang tegas, mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap efisiensi anggaran menjadi sulit dilakukan, terutama di tingkat pelaksanaan. Akibatnya, kebijakan yang seharusnya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran justru bisa berujung pada pemotongan yang tidak tepat sasaran atau bahkan penyalahgunaan wewenang.

Terkait dengan hal tersebut, misalnya, dinyatakan dalam Inpres 1/2025 bagian keempat bahwa efisiensi diberlakukan untuk kegiatan yang bersifat seremonial, studi banding, percetakan, publikasi, seminar/*focus group discussion* dan perjalanan dinas. Meskipun demikian, merujuk pada Kompas.com (13/2/2025), nyatanya efisiensi anggaran juga berdampak pada tunjangan dosen hingga beasiswa yang ikut dipangkas. Hal ini juga diperkuat dalam rapat dengar DPR RI, Kemendikti Saintek menyampaikan efisiensi anggaran berdampak pada >60.000 ribu mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar - Kuliah (KIP-K), sulitnya melakukan rekrutmen penerima KIP-K, terbatasnya akses pendidikan dan 3T (tertinggal, terdepan, terluar) dan alokasi dana bagi tenaga pendidikan.

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH
Jl. HOS. Cokroaminoto No 92, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310
Telepon: +6221 3158032
Email: contact@theindonesianinstitute.com

Ketidakjelasan definisi dan minimnya penjelasan, serta klarifikasi dari pemerintah mengenai kebijakan efisiensi anggaran mencerminkan lemahnya kapasitas komunikasi publik yang dimiliki oleh pemerintah. Dalam laporan Evaluasi 200 Hari Menteri Kabinet Merah Putih yang dilakukan oleh The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (Mei 2025), disebutkan bahwa meskipun secara umum komunikasi publik pemerintah memperoleh skor tinggi (77,6%), terdapat kelemahan mencolok pada sub-indikator, seperti kecepatan merespons untuk menjaga stabilitas dan keterampilan komunikasi, yang mendapat nilai paling rendah. Hal ini selaras dengan indikator konsistensi kebijakan yang juga meraih skor rendah, yaitu 44,27%, di mana rasa mendesak untuk segera bertindak *(sense of urgency)* hanya berada di angka 35,42%.

Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara citra komunikasi publik yang dibangun dengan efektivitas komunikasi aktual di lapangan. Ketika kebijakan efisiensi berdampak langsung pada sektor krusial seperti pendidikan tinggi, misalnya pemangkasan beasiswa KIP-K dan tunjangan dosen, pemerintah seharusnya mampu memberikan justifikasi yang transparan dan argumentasi yang meyakinkan kepada publik. Ketidakhadiran komunikasi yang memadai justru memperlebar potensi ketidakpercayaan publik dan memperkuat persepsi bahwa kebijakan dibuat secara terburu-buru tanpa mempertimbangkan dampak sosial jangka panjang. Dalam konteks ini, kelemahan komunikasi tidak hanya menjadi persoalan teknis, tetapi juga menjadi indikator lemahnya akuntabilitas dan sensitivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat yang terdampak.

Selain itu, hal ini juga tidak sesuai dengan prinsip AUPB, di mana setiap kebijakan publik seharusnya memenuhi prinsip keterbukaan, kepastian hukum, kemanfaatan, dan tidak menyalahgunakan kewenangan. Ketika pemangkasan anggaran dilakukan secara drastis tanpa penjelasan yang komprehensif, transparan, dan berbasis pada analisis kebijakan yang matang, maka kebijakan tersebut berisiko bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Terlebih lagi, dalam konteks efisiensi anggaran, prinsip kemanfaatan dan kecermatan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan benar-benar menciptakan nilai publik dan tidak sekadar menjadi simbol penghematan.

Aspek lain yang perlu menjadi perhatian adalah komposisi kabinet secara umum yang justru berkontribusi terhadap peningkatan beban anggaran negara. Dalam konteks pemerintahan Prabowo-Gibran, penguatan Koalisi Indonesia Maju (KIM) sebagai basis politik pemerintahan tidak lepas dari logika akomodasi kekuasaan yang lazim dalam sistem presidensial multipartai

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH
Jl. HOS. Cokroaminoto No 92, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310
Telepon: +6221 3158032
Email: contact@theindonesianinstitute.com

di Indonesia. Komposisi kabinet yang gemuk, dengan bertambahnya jumlah kementerian dan posisi setingkat menteri, serta rangkap jabatan, tidak hanya mencerminkan preferensi politik untuk membagi kekuasaan kepada para pendukung utama, tetapi juga memperlihatkan bagaimana efisiensi anggaran cenderung dijadikan retorika normatif yang tidak konsisten dengan realitas kebijakan.

Misalnya, masuknya tokoh-tokoh dari berbagai partai pendukung Prabowo dalam jajaran kabinet, bahkan untuk posisi yang sebelumnya tidak ada atau tidak mendesak, menunjukkan adanya alokasi jabatan yang lebih didorong oleh kepentingan koalisi ketimbang efisiensi struktural. Praktik ini menguatkan temuan Grossman (1994) dalam "A Political Theory of Intergovernmental Grants", bahwa distribusi sumber daya publik, baik dalam bentuk anggaran maupun jabatan, sering digunakan untuk mengkonsolidasikan dukungan politik dan memperkuat kontrol pemerintahan terhadap aktor-aktor strategis.

Selain itu, upaya pemangkasan anggaran di sejumlah kementerian dan lembaga juga menunjukkan ketidakkonsistenan dalam penerapan prinsip efisiensi. Beberapa kementerian/lembaga (K/L) yang tidak memiliki dampak signifikan terhadap target pembangunan nasional tetap dipertahankan dengan struktur anggaran yang relatif stabil bahkan sangat besar. Sementara, sektor esensial seperti pendidikan dan riset justru mengalami pemangkasan tajam sebagaimana dapat dilihat dalam dua tabel di bawah ini.

Tabel 1. Sepuluh Kementerian/Lembaga dengan Alokasi Anggaran Tertinggi Tahun 2025

No	Kementerian/Lembaga	Anggaran 2025 (Triliun Rupiah)
1	Badan Gizi Nasional	217,86
2	Kementerian Pertahanan	167,4
3	Kepolisian RI	109, 67
4	Kementerian Kesehatan	104, 35
5	Kementerian Sosial	76,04
6	Kementerian Agama	75,21
7	Kementerian Pekerjaan Umum	70,86
8	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	55,45
9	Kementerian Keuangan	47,13
10	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	33,65

Sumber: Tempo.co (31/5/2025).

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH
Jl. HOS. Cokroaminoto No 92, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310
Telepon: +6221 3158032
Email: contact@theindonesianinstitute.com

Tabel 2. 11 Program Unggulan Prabowo Subianto Berdasarkan Prioritas (Diurutkan Berdasarkan Program Prioritas)

No	Nama Program	Anggaran (Triliun Rupiah)
1	Makan Bergizi Gratis (MBG)	121,00
2	Program 3 Juta Rumah	41,88
3	Koperasi Desa Merah Putih	200,00
4	Sekolah Rakyat	11,60
5	Sekolah Unggul Garuda	2,00
6	Rehabilitasi Sekolah	19,50
7	Cek Kesehatan Gratis (CKG)	3,40
8	Penuntasan Tuberkulosis	1,50
9	Pembangunan Rumah Sakit Berkualitas	1,70
10	Lumbung Pangan	23,16
11	Pembangunan Bendungan & Irigasi	20,50

Sumber: CNBC (4/6/2025).

Dari dua tabel di atas, dapat kita ketahui bahwa beberapa program unggulan Prabowo, seperti MBG (Rp121T) dan Koperasi Merah Putih (Rp200T), memiliki alokasi yang lebih besar dibandingkan seluruh anggaran kementerian besar seperti Kementerian Kesehatan (Rp104T) dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia(Rp55T). Padahal, program-program ini belum memiliki infrastruktur kelembagaan mapan atau indikator keberhasilan yang jelas. Misalnya, Koperasi Merah Putih belum memiliki kerangka regulasi yang memadai dan mekanisme implementasi yang teruji.

Lebih jauh, program seperti Sekolah Unggul Garuda (Rp2T) dan Penuntasan Tuberkulosis (TBC) (Rp1,5T) hanya mendapat porsi kecil, meskipun menyasar isu krusial seperti kesehatan masyarakat dan pendidikan. Sebaliknya, program seperti Koperasi Desa Merah Putih, yang secara politik lebih mudah dimobilisasi untuk membangun loyalitas konstituen di akar rumput, mendapat alokasi jumbo. Ini selaras dengan logika *Public Choice Theory* bahwa kebijakan sering kali dibentuk oleh logika kepentingan politik, bukan urgensi publik.

Tumpang tindih kelembagaan juga bisa kita amati melalui dua tabel di atas. Misalnya, MBG memiliki anggaran Rp121T, tetapi tidak sepenuhnya jelas siapa yang akan mengeksekusi, Badan Gizi Nasional

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH
Jl. HOS. Cokroaminoto No 92, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310
Telepon: +6221 3158032
Email: contact@theindonesianinstitute.com

(BGN), Kementerian Sosial, atau lembaga baru? Kenyataannya, Badan BGN sendiri sudah menjadi lembaga dengan anggaran terbesar 2025 (Rp217T). Ini menunjukkan adanya tumpang tindih peran dan potensi pemborosan akibat fragmentasi lembaga.

Dalam pernyataan Sri Mulyani dalam CNBC Indonesia (4/6/2025), APBN ditekankan sebagai alat untuk menjaga daya beli, mendukung dunia usaha, dan menciptakan lapangan kerja. Namun, alokasi Rp200T ke koperasi yang belum teruji efektivitasnya dan pengabaian terhadap isu kesehatan publik (penuntasan TBC atau rumah sakit berkualitas) bertolak belakang dengan semangat tersebut. Hal ini justru mencerminkan penggunaan APBN untuk konsolidasi politik jangka pendek, bukan mitigasi dampak jangka panjang krisis global. Selain itu, pendidikan dasar dan kesehatan masyarakat terlihat hanya menjadi "pelengkap" dalam daftar prioritas. Padahal, kedua sektor inilah yang menjadi fondasi produktivitas nasional dalam jangka panjang.

Ketidakseimbangan ini mengindikasikan bahwa keputusan efisiensi tidak seluruhnya berbasis pada evaluasi kinerja atau urgensi publik, melainkan pada preferensi politik dan potensi resistensi yang mungkin timbul. Hal ini tercermin dari alokasi anggaran tahun 2025, di mana Kementerian Pertahanan (Kemenhan) justru mengalami peningkatan anggaran sebesar 18,6% menjadi Rp165,2 triliun, menjadikannya lembaga dengan anggaran terbesar. Begitu pula Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang mendapatkan peningkatan 7,3%, serta Kejaksaan yang naik signifikan hingga 31,6%. Sebaliknya, kementerian yang menangani sektor layanan publik seperti Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dan Kementerian Pekerjaan Umum justru mengalami pemangkasan drastis, masing-masing sebesar 16,0% dan 48,7%.

Kecenderungan ini mengindikasikan adanya pergeseran orientasi belanja negara yang lebih mengutamakan sektor keamanan dan aparat hukum dibandingkan sektor pembangunan manusia dan infrastruktur dasar. Dalam konteks teori *Public Choice*, penguatan alokasi anggaran ke sektor keamanan dapat dibaca sebagai upaya memperkuat kontrol politik terhadap potensi instabilitas dan oposisi. Sementara, pemangkasan pada sektor pendidikan dan pembangunan fisik mengindikasikan bahwa kebijakan efisiensi diterapkan secara selektif dan tidak sepenuhnya berdasarkan kebutuhan objektif. Hal ini juga mencerminkan adanya kalkulasi politik untuk mempertahankan loyalitas aktor-aktor strategis dalam struktur kekuasaan daripada mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk kepentingan publik secara merata.

Upaya kontrol politik melalui sektor keamanan, khususnya TNI, juga tercermin dalam kebijakan rekrutmen besar-besaran yang dilakukan institusi tersebut. Mengutip Tempo.co (15/5/2025), TNI berencana merekrut 24 ribu personel untuk mengisi kompi pertanian, kesehatan, peternakan, hingga rekayasa teknik militer. Kebijakan ini menimbulkan sejumlah

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH
Jl. HOS. Cokroaminoto No 92, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310
Telepon: +6221 3158032
Email: contact@theindonesianinstitute.com

pertanyaan, tidak hanya karena dijalankan di tengah kebijakan efisiensi anggaran, tetapi juga karena mengindikasikan perluasan fungsi militer ke ranah sipil yang berpotensi mengaburkan batas antara otoritas militer dan sipil. Langkah ini dikhawatirkan menjadi bagian dari strategi politik untuk memperbesar peran TNI dalam kehidupan masyarakat, alih-alih didasarkan pada kebutuhan pertahanan yang objektif dan profesionalisme militer.

Lebih jauh, dalam kerangka teori *Public Choice*, kebijakan efisiensi anggaran di era Prabowo-Gibran dapat dibaca sebagai bentuk perilaku politik yang rasional (*rational political behavior*), di mana aktor politik berupaya memaksimalkan insentif elektoral dan memperkuat posisinya dalam sistem kekuasaan yang terfragmentasi. Dalam konteks ini, penting dicatat bahwa Prabowo berlatar belakang militer, yang dapat memengaruhi cara pandang dan preferensinya terhadap efisiensi dan alokasi sumber daya negara. Seperti ditegaskan Chohan (2024), aktor-aktor dalam pemerintahan tidak netral secara tujuan, melainkan digerakkan oleh kepentingan pribadi dan institusional yang rasional secara politik, meskipun belum tentu efisien secara ekonomi atau adil secara sosial.

Namun, dalam konteks pemerintahan yang demokratis dan berbasis hukum, praktik seperti ini tetap harus diuji melalui prinsip *Good Governance* dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). UU No. 30 Tahun 2014 menegaskan bahwa setiap keputusan harus berlandaskan pada keterbukaan, kepastian hukum, kemanfaatan, dan tidak menyalahgunakan wewenang. Oleh karena itu, kebijakan efisiensi anggaran yang tidak disertai dengan indikator yang jelas, transparansi, dan justifikasi publik berisiko melanggar prinsip-prinsip tersebut.

Lebih dari itu, pemerintah tampak belum mengoptimalkan analisis situasi dalam proses perencanaan kebijakan, yang seharusnya menjadi elemen penting dalam menentukan prioritas dan efisiensi anggaran. Analisis situasi tidak hanya berfungsi untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, tetapi juga untuk mengkaji efektivitas kebijakan yang akan berjalan. Ketika analisis ini tidak dilakukan secara komprehensif, kebijakan yang dihasilkan berisiko menjadi kurang tepat sasaran dan tidak mempertimbangkan dampak jangka panjangnya.

Dr. Dede Puji Setiono, Dosen Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada, dalam diskusi Initiative! The Indonesian Institute (20/2/2025), menilai bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah masih berbasis pada pertimbangan yang bersifat administratif, tanpa analisis mendalam terhadap implikasi terhadap program-program esensial. Ketiadaan batasan definisi, tujuan, serta indikator yang jelas juga dapat menyebabkan penerapan kebijakan yang tidak konsisten. Misalnya, tidak dijelaskan secara transparan alasan pemangkasan ekstrem anggaran pada

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH
Jl. HOS. Cokroaminoto No 92, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310
Telepon: +6221 3158032
Email: contact@theindonesianinstitute.com

kementerian atau lembaga tertentu, sementara yang lain hanya mengalami perubahan minor atau bahkan peningkatan anggaran.

Ketidakjelasan ini membuka ruang bagi praktik yang tidak akuntabel dan berpotensi digunakan secara selektif untuk mengakomodasi kepentingan politik tertentu. Dalam jangka panjang, pola seperti ini tidak hanya mengganggu stabilitas dan kejelasan proses kebijakan, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola anggaran yang adil dan berbasis kebutuhan. Tanpa kerangka evaluasi yang jelas, kebijakan efisiensi justru berisiko menjadi alat legitimasi atas keputusan-keputusan yang sarat kalkulasi kekuasaan.

Sebagai contoh, di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin justru mengangkat pesohor Deddy Corbuzier sebagai staf khusus (Suara.com, 11/2/2025). Keputusan ini menunjukkan bahwa terdapat ruang fleksibilitas dalam pengalokasian anggaran, meskipun di saat yang sama beberapa program mengalami pemangkasan. Ruang fleksibilitas ini kemudian juga tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai batasan dan justifikasi tentang prioritas yang jelas. Hal ini menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak hanya memerlukan pemangkasan belanja, tetapi juga pertimbangan penambahan karyawan yang berbasis pada urgensi dan dampak terhadap efektivitas kebijakan publik secara keseluruhan.

Aspek lain yang patut mendapat perhatian adalah komposisi kabinet yang justru berkontribusi terhadap peningkatan beban anggaran negara. Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Prabowo–Gibran, sejak dilantik pada 21 Oktober 2024, terdiri atas 48 menteri dan 55 wakil menteri, ditambah sejumlah pejabat setingkat menteri, dengan total mencapai 109 pos jabatan (Tempo.co, 21/10/2024). Jumlah ini jauh melampaui struktur Kabinet Indonesia Maju yang sebelumnya hanya mencakup 34 menteri dan 19 wakil menteri. Menariknya, keputusan ini bertolak belakang dengan semangat efisiensi anggaran yang digaungkan pemerintah. Bahkan setelah terbitnya Inpres 1/2025, presiden tidak menunjukkan indikasi akan merampingkan jumlah pembantunya. Secara keseluruhan, struktur kabinet yang lebih gemuk dan keberadaan sejumlah posisi strategis baru berpotensi meningkatkan alokasi anggaran untuk operasional kementerian dan lembaga.

Di sisi lain, praktik efisiensi di berbagai negara menunjukkan bahwa optimalisasi kelembagaan dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi beban anggaran tanpa mengorbankan efektivitas kebijakan publik, meskipun hal ini dilakukan dalam kondisi dan konteks yang

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH
Jl. HOS. Cokroaminoto No 92, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310
Telepon: +6221 3158032
Email: contact@theindonesianinstitute.com

berbeda-beda di setiap negara (Salman, 2025). Sebagai perbandingan, Argentina telah menerapkan kebijakan pemangkasan jumlah kementerian dan lembaga sebagai bagian dari strategi efisiensi fiskal mereka Presiden Javier Milei, yang mulai menjabat pada bulan Desember 2023, menghadapi tantangan ekonomi berat dengan inflasi mencapai 211% dan kemiskinan tinggi (Reuters, 17/1/2025).

Untuk mengatasi hal ini, Milei mengurangi jumlah kementerian dari 21 menjadi 9, serta memangkas sekitar 30.000 pegawai negeri sipil, atau hampir 10% dari total pegawai federal. Langkah-langkah ini bertujuan menyederhanakan struktur pemerintahan, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan efektivitas koordinasi antarinstansi (ap.org, 24/12/2024). Langkah-langkah ini bertujuan menyederhanakan struktur pemerintahan, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan efektivitas koordinasi antarinstansi. Sebagai hasilnya, Argentina mencatat surplus anggaran sebesar 1,76 triliun peso (sekitar 0,3% dari PDB) pada tahun 2024, yang merupakan pencapaian pertama dalam lebih dari satu dekade (Buenos Aires Times, 17/1/2025).

Contoh lain, Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump membentuk Departemen Efisiensi Pemerintah/*Department of Government Efficiency*(DOGE), yang dipimpin oleh Elon Musk bersama dengan Vivek Ramaswamy. Departemen ini bertujuan memangkas anggaran federal dengan berbagai langkah, termasuk penghentian kerja jarak jauh, pembekuan perekrutan, dan pemangkasan pegawai negeri secara luas. Lebih dari 75.000 pegawai negeri sipil ditawari program *buyout* dengan gaji penuh hingga delapan bulan, jika mereka mengundurkan diri secara sukarela. Hingga bulan Februari 2025, sekitar 9.500 pegawai telah diberhentikan, dengan target pemangkasan mencapai 3% dari total 2,3 juta pegawai negeri sipil federal (Goverment Executive, 9/4/2025).

Dalam konteks Indonesia, keselarasan antara visi efisiensi anggaran dengan implementasinya menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya berorientasi pada penghematan, tetapi juga pada peningkatan tata kelola pemerintahan. Secara keseluruhan, kebijakan efisiensi anggaran di era Prabowo-Gibran tidak bisa dilepaskan dari refleksi kepentingan politik dalam pengelolaan anggaran negara. Efisiensi tidak hanya menyangkut soal penghematan, tetapi juga menjadi arena kontestasi antara logika teknokratis dan strategi politik.

Dalam analisis teori *Public Choice*, keputusan ini merepresentasikan bagaimana efisiensi anggaran dapat menjadi instrumen politik untuk memperkuat kekuasaan melalui akomodasi jabatan, selektivitas alokasi anggaran, dan minimalisasi resistensi elite. Oleh karena itu, urgensi

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH
Jl. HOS. Cokroaminoto No 92, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310
Telepon: +6221 3158032
Email: contact@theindonesianinstitute.com

untuk merumuskan indikator efisiensi yang objektif dan dapat diawasi secara publik menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa efisiensi benar-benar mendukung tata kelola yang baik, bukan justru menjadi selubung bagi kompromi politik.

Bagian berikutnya membahas bagaimana kebijakan efisiensi ini berdampak pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan dan riset, serta bagaimana aktor-aktor non-pemerintah menilai dan merespons kebijakan tersebut dalam lanskap kebijakan publik Indonesia yang semakin kompleks.

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Jl. HOS. Cokroaminoto No 92, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310
Telepon: +6221 3158032
Email: contact@theindonesianinstitute.com

Pemetaan Kelompok Kepentingan pada Kebijakan Fiskal Era Pemerintahan Prabowo-Gibran

Bagian ini berusaha menjawab bagaimana kelompok kepentingan memengaruhi kebijakan fiskal pada era Pemerintahan Prabowo-Gibran dengan mengeksplorasi beberapa poin bahasan, seperti kelompok yang terlibat dalam konsentrasi proyek prioritas, mengidentifikasi penyebab dari perubahan kebijakan fiskal, serta mengeksplorasi hubungan antara pejabat negara dan pelaku bisnis utama dalam proyek yang dijalankan oleh negara. Sebelum mengelaborasi lebih jauh, pemetaan kelompok kepentingan dalam studi ini secara umum dapat dilihat melalui tabel berikut ini.

Tabel 3. Matriks Pemetaan Kelompok Kepentingan Terhadap Kebijakan Fiskal Era Prabowo–Gibran

Kelompok Kepentingan	Kepentingan Utama	Peran dalam Kebijakan	Bentuk Keuntungan	Tingkat Kedekatan dengan Kekuasaan
Militer (aktif dan purnawirawan)	Ekspansi peran di sektor sipil dan anggaran pertahanan	Pelaksana program MBG, dominasi dalam proyek nasional	Kenaikan anggaran, jabatan sipil, konsolidasi pengaruh politik	Sangat tinggi
Korporasi besar	Akses proyek strategis, konsesi lahan, kontrak besar	Mitra proyek perumahan, *food estate*, dan infrastruktur	Proyek, akses lahan, insentif fiskal	Tinggi
Elite politik	Posisi politik, pengaruh kebijakan, kontrol program	Penentu arah program (*food estate*, perumahan)	Jabatan strategis, legitimasi politik	Sangat tinggi
Mitra asing	Investasi strategis dan pengaruh ekonomi	Pendanaan proyek dan infrastruktur	Keuntungan investasi, pengaruh geopolitik	Menengah-tinggi
Masyarakat sipil	Akses layanan dasar, keadilan sosial	Penerima manfaat, tetapi kurang dilibatkan dalam proses	Bantuan terbatas, tetapi dengan kontrol politik	Sangat rendah
Teknokrat	Tata kelola baik, efektivitas kebijakan publik	Minim dilibatkan dalam desain kebijakan	Terpinggirkan dalam pengambilan keputusan	Rendah

Diolah dari berbagai sumber.

Setelah melihat bagaimana berbagai kelompok kepentingan terpetakan dalam struktur kebijakan fiskal, kita dapat menelusuri lebih lanjut bagaimana kepentingan tersebut terartikulasikan dalam pelaksanaan proyek-proyek prioritas nasional. Dalam konteks Proyek Strategis Nasional (PSN), melansir Kompas.com (3/3/2025), tercatat sebanyak 77 proyek yang ditandatangani oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto melalui Peraturan Presiden (Perpres)

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH
Jl. HOS. Cokroaminoto No 92, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310
Telepon: +6221 3158032
Email: contact@theindonesianinstitute.com

Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029.

Dari total tersebut, 48 proyek merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya (*carry over*), sementara 29 proyek lainnya merupakan inisiatif baru. Salah satu yang paling menonjol adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang sejak awal dikampanyekan sebagai program unggulan Prabowo–Gibran. Namun, kontroversi muncul ketika pemerintah mengklaim tingkat keberhasilan program ini mencapai 99,99 persen (Kompas.com, 5/5/2025), meskipun terdapat insiden keracunan massal di sejumlah sekolah. Klaim tersebut memperlihatkan kecenderungan penguasa mereduksi kegagalan kebijakan publik dan menjustifikasi posisi dan kelompok kepentingan yang dilibatkannya. Klain ini juga menunjukkan bahwa fakta ini hanya dianggap sebagai deviasi statistik, tanpa mengakui implikasi seriusnya terhadap hak anak atas kesehatan dan keselamatan.

Lebih dari sekadar retorika angka, pendekatan ini menunjukkan pola pikir teknokratis yang hanya mengedepankan capaian kuantitatif, namun abai terhadap kualitas pelaksanaan dan keselamatan publik. Dalam analisis kebijakan publik, penting untuk menyoroti bahwa sekecil apa pun insiden yang menyangkut nyawa dan kesehatan masyarakat, terutama anak-anak, tidak bisa disederhanakan menjadi '*margin of error'* sebagaimana disampaikan Schneider (2024). Hal ini memperlihatkan kegagalan pemerintah dalam memaknai keberhasilan kebijakan secara substantif, yakni yang menjamin keadilan, keselamatan, dan akuntabilitas.

Lebih jauh, jika kita menelaah struktur implementasi proyek MBG, tampak bahwa kekuasaan dan kendali atas pelaksanaannya tidak terdistribusi secara adil. Indikasi bahwa pelaksana utama program ini didominasi oleh aktor-aktor militer (DetikNews, 16/4/2025) memperkuat asumsi dan kekuatiran publik akan adanya militerisasi dalam kebijakan sipil, sebuah tren yang semakin menguat dalam pemerintahan Prabowo–Gibran. Hal ini patut dikritisi karena tidak hanya menutup ruang partisipasi sipil, tetapi juga berisiko menimbulkan pendekatan yang otoriter dan tidak sensitif terhadap aspek sosial dan budaya lokal, serta tidak relevan dan profesional dengan kapabilitas yang dimiliki oleh TNI.

Hal serupa juga terlihat dalam keputusan pemerintah untuk tetap melanjutkan program *food estate*, meskipun secara luas telah dinilai gagal oleh berbagai pihak, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (COP29) mengutip Tempo.co (27/11/2024). Mengutip CNN Indonesia (10/12/2024), Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, yang juga adik kandung Prabowo, mengatakan bahwa proyek tersebut akan tetap dijalankan. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang konflik

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH
Jl. HOS. Cokroaminoto No 92, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310
Telepon: +6221 3158032
Email: contact@theindonesianinstitute.com

kepentingan, akuntabilitas dalam pengambilan keputusan kebijakan, serta transparansi dalam proses evaluasi pemerintah dan prioritas proyek. Padahal, evaluasi independen menunjukkan bahwa program *food estate* tidak hanya gagal secara produktivitas, tetapi juga merusak lingkungan dan mengabaikan hak masyarakat adat (Laporan Konsorsium Pembaruan Agraria, 2024).

Sementara, janji politik lainnya, seperti program pembangunan 3 juta rumah yang diinisiasi digarap Maruarar Sirait sebagai Menteri Perumahan dan Permukiman Indonesia, juga menuai kritik karena dinilai tidak realistis. Melansir Kompas.com (21/3/2025), Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono mengatakan, penyaluran bantuan rumah subsidi tahun 2025 masih ditalangi oleh bank. Selain itu, keterlibatan perusahaan besar seperti Agung Sedayu Group dan dukungan dari negara-negara, seperti Qatar dan Uni Emirat Arab, dalam pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menunjukkan adanya pendekatan kemitraan publik-swasta (Public Private Partnership/PPP) yang intensif di era pemerintahan Prabowo (BBC Indonesia, 10/1/2025).

Di satu sisi, dukungan swasta dan asing diharapkan dapat mempercepat pencapaian target pembangunan, terutama dalam hal pendanaan, teknologi, dan efisiensi pembangunan. Di sisi lain, pendekatan ini menyimpan risiko akuntabilitas dan dominasi kebijakan oleh aktor-aktor swasta dan elite politik. Di tengah minimnya transparansi dan akuntabilitas dalam penunjukan mitra dan pengawasan implementasi proyek, kemitraan ini berpotensi memperkuat oligarki pembangunan, di mana hanya kelompok tertentu yang mendapatkan keuntungan langsung dari program pemerintah.

Namun, praktik pelibatan kelompok tertentu secara eksklusif dalam proyek strategis juga memperlihatkan bagaimana keuntungan langsung dapat mengalir ke pihak-pihak tertentu tanpa melalui proses yang transparan. MBG misalnya, keterlibatan TNI menjadi sorotan publik ketika diketahui bahwa sebanyak 71 dapur lapangan dikelola langsung oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (DetikNews, 16/4/2025). Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak bahkan menyatakan bahwa pihaknya telah mengelola anggaran sebesar Rp7 miliar untuk mendukung operasional dapur tersebut. Selain alokasi anggaran besar, pemerintah juga menunjuk sejumlah mitra katering tanpa mekanisme tender terbuka yang jelas. Misalnya, kasus yang terjadi pada dapur MBG Kalibata, yang akhirnya berhenti beroperasi karena mitra swasta mengalami kerugian hampir Rp1 miliar akibat pemotongan

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH
Jl. HOS. Cokroaminoto No 92, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310
Telepon: +6221 3158032
Email: contact@theindonesianinstitute.com

harga per porsi dari Rp15.000 menjadi Rp10.500 dan keterlambatan pembayaran, meskipun akhirnya masalah selesai dan dapur tersebut kembali beroperasi (Kompas.com, 24/4/2025).

Situasi tersebut menandakan adanya konsentrasi keuntungan kepada aktor yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan, baik melalui hubungan struktural seperti militer, maupun melalui kemitraan swasta yang dipilih secara tidak transparan dan akuntabel. Model pelaksanaan seperti ini tidak hanya berpotensi melemahkan akuntabilitas publik, tetapi juga menghambat keterlibatan aktor lokal, seperti Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) atau koperasi sekolah, yang seharusnya bisa diberdayakan secara lebih luas dalam pelaksanaan program.

Selain itu, pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa proyek pembangunan yang terlalu berpihak pada korporasi sering mengabaikan aspek keberlanjutan sosial dan lingkungan, serta aksesibilitas masyarakat miskin terhadap hasil proyek. Proyek perumahan dan *food estate*, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) juga menunjukkan pola serupa. Misalnya, di Kecamatan Sepaku, konflik tenurial muncul akibat konsesi lahan dari perusahaan seperti PT ITCI Hutani Manunggal sebelum dialihkan ke proyek IKN, tanpa proses partisipatif warga setempat, sehingga pangan dan mata pencarian masyarakat lokal terancam. Masyarakat pesisir Teluk Balikpapan juga menyuarakan kerusakan ekosistem yang mengancam kehidupan nelayan kecil, serta aktivitas bongkar muat dan industri turut mengusir nelayan tradisional dari wilayah tangkapan mereka tanpa kompensasi jelas (kalimantan.bisnis.com, 30/10/2023).

Kasus ini memperlihatkan pola keuntungan langsung bagi aktor korporasi dan proyek pemerintah, dengan relasi dekat antara investor dan penguasa, sementara akses masyarakat miskin terpangkas, transparansi minim, dan tata kelola ekologi terabaikan. Kehadiran modal asing juga perlu dibaca secara hati-hati, terutama dalam konteks kedaulatan tata kelola perumahan nasional. Jika tidak disertai kerangka regulasi dan tata kelola yang baik, program ini berpotensi menjadi celah baru bagi privatisasi perumahan dan gentrifikasi yang justru menjauhkan MBR dari kepemilikan rumah yang layak.

Berdasarkan elaborasi di atas, dapat dilihat bahwa kebijakan fiskal pemerintahan Prabowo-Gibran cukup kental dengan konflik kepentingan. Proses kebijakan yang cenderung *top-down* dan keikutsertaan pihak-pihak yang dekat dengan Prabowo juga membuat kebijakan publik patut dipertanyakan akuntabilitas dan transparansinya. Bahkan, lepas dari kontroversi, ketidakjelasan, dan kegagalan kebijakan yang diusung, pemerintah tetap bersikukuh untuk melanjutkan kebijakan yang bermasalah.

Jika ditinjau dari pendekatan ekonomi politik, khususnya melalui lensa teori *Public Choice*, pola pengambilan keputusan fiskal dalam pemerintahan Prabowo–Gibran mencerminkan

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH
Jl. HOS. Cokroaminoto No 92, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310
Telepon: +6221 3158032
Email: contact@theindonesianinstitute.com

kecenderungan kuat pada kepentingan individual dan kelompok yang dekat dengan pusat kekuasaan. Sebagaimana diuraikan Chohan (2024), aktor-aktor dalam sektor publik cenderung bertindak secara rasional untuk memaksimalkan insentif politik, seperti memperkuat dukungan elektoral dan memperluas jejaring kekuasaan. Hal ini dapat dilihat dalam konsistensi pemerintah melanjutkan proyek-proyek kontroversial, mulai dari MBG, *food estate*, hingga pembangunan IKN, meskipun terdapat evaluasi publik dan akademik yang menunjukkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan. Dalam konteks ini, alokasi anggaran bukan lagi instrumen teknokratis semata, melainkan bagian dari strategi politik yang bersandar pada logika pertukaran untuk mengamankan dukungan melalui distribusi sumber daya.

Lebih jauh, seperti dikemukakan oleh Grossman (1994) dan Breton (1993), logika distribusi fiskal juga sering kali berfungsi sebagai alat untuk "membeli" loyalitas politik, terutama di daerah-daerah dengan afiliasi politik yang sejalan atau strategis bagi keberlangsungan rezim. Konteks ini menegaskan bahwa distribusi anggaran, termasuk melalui proyek prioritas nasional, tidak netral secara politik. Meskipun kerangka normatif AUPB telah diatur, pelaksanaannya masih dihadapkan pada praktik-praktik yang dipengaruhi kepentingan elektoral dan relasi kuasa informal. Dengan demikian, untuk memahami bagaimana arah kebijakan fiskal dijalankan, analisis perlu bergeser dari sekadar membaca angka dan program, menuju pembacaan yang lebih struktural, yakni menelaah bagaimana patronase politik membentuk preferensi anggaran dan aktor mana saja yang mendapat keuntungan darinya. Untuk itu, bagian berikutnya memberikan penjabaran lebih lanjut tentang patronase dalam politik distribusi anggaran.

Analisis Pola Patronase Politik Distribusi Anggaran di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Bagian ini membahas mengenai dinamika patronase politik dalam distribusi anggaran, dengan melihat pola alokasi dan prioritas belanja kementerian secara kualitatif. Pola patronase politik dalam distribusi anggaran pada pemerintahan Prabowo–Gibran mulai menunjukkan karakter khas yang menandai arah politik fiskal mereka: pergeseran dari pendekatan populis yang menekankan perluasan bantuan langsung kepada masyarakat, menuju pendekatan yang lebih strategis, terpusat, dan berorientasi pada keamanan serta simbol-simbol ketahanan negara.

Dalam konteks ini, anggaran tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknokratis untuk mendorong pembangunan, tetapi juga sebagai alat politik untuk memperkuat basis kekuasaan, merawat loyalitas institusional, dan memastikan stabilitas *elite governing coalition.* Pendekatan ini tercermin dari meningkatnya alokasi anggaran untuk kementerian atau lembaga

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH
Jl. HOS. Cokroaminoto No 92, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310
Telepon: +6221 3158032
Email: contact@theindonesianinstitute.com

yang beririsan langsung dengan keamanan, pertahanan, serta proyek nasional berskala besar yang dikendalikan oleh aktor-aktor yang dekat dengan lingkaran kekuasaan.

Narasi efisiensi yang dijadikan justifikasi utama dalam restrukturisasi anggaran justru membuka ruang interpretasi bahwa efisiensi anggaran merupakan proses repolitisasi anggaran, di mana institusi-institusi yang dekat dengan poros kekuasaan dan memiliki fungsi simbolik tinggi dalam menopang kekuatan eksekutif mendapatkan alokasi yang menguat. Seperti temuan dan pembahasan di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintahan Prabowo-Gibran mencerminkan konflik kepentingan dan patronase politik para pemangku kepentingan, terutama yang dekat dengan pemerintah.

Jika dicermati dari perbandingan rancangan anggaran tahun 2024 dan 2025, secara nominal memang hampir semua sektor mengalami kenaikan. Namun, jika dilihat dari proporsi, sektor-sektor seperti perlindungan sosial dan subsidi mengalami penurunan, sementara anggaran untuk sektor seperti hukum dan pertahanan keamanan justru meningkat. Hal ini menandakan adanya reorientasi dan preferensi kebijakan dan pembiayaannya, dari pendekatan anggaran yang bersifat kesejahteraan ke arah pendekatan stabilitas, di mana negara diposisikan lebih sebagai pelindung dari potensi ancaman dan bukan sebagai fasilitator kesejahteraan masyarakat. Dalam logika patronase, hal ini merupakan indikasi bahwa anggaran menjadi alat legitimasi dan pemantapan dukungan terhadap institusi yang memainkan peran penting dalam menjaga kekuasaan, seperti TNI dan Polri.

Pergeseran signifikan juga terlihat dari struktur pagu anggaran antar-kementerian. Kementerian Pertahanan menjadi penerima alokasi terbesar, disusul oleh Polri. Kenaikan anggaran untuk kedua institusi ini tidak hanya mencerminkan prioritas keamanan, tetapi juga memperlihatkan preferensi politik Prabowo yang memang memiliki latar belakang militer. Dalam konteks patronase, hal ini membuka kemungkinan digunakannya anggaran sebagai instrumen konsolidasi dukungan internal, terutama dari aktor-aktor militer yang menjadi basis kekuatan politik Prabowo sejak awal.

Menarik pula dicermati bahwa Kementerian Pekerjaan Umum mengalami penurunan anggaran cukup besar, menandai mundurnya agenda infrastruktur masif yang menjadi ciri khas pemerintahan Jokowi. Namun, penurunan ini tidak serta-merta menghilangkan wajah program populis. Salah satu contoh paling konkret dari praktik patronase fiskal yang berpihak pada kelompok kekuasaan adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam implementasinya, pemerintah menunjuk Badan Gizi Nasional (BGN) yang belum memiliki rekam jejak

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH
Jl. HOS. Cokroaminoto No 92, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310
Telepon: +6221 3158032
Email: contact@theindonesianinstitute.com

pelayanan publik luas, tetapi mendapatkan alokasi anggaran besar sejak awal, bahkan melampaui sejumlah kementerian lama (Katadata, 11/9/2024).

Lebih kontroversial lagi, pengelolaan dapur umum dan logistik MBG di sejumlah daerah diberikan kepada elemen militer, termasuk Komando Daerah Militer (Kodam), yang diklaim memiliki "kapasitas distribusi cepat". Misalnya, kerja sama antara BGN dan TNI di wilayah Jawa Tengah dilaporkan melibatkan pengadaan 250 dapur lapangan yang biayanya mencapai Rp800 juta per titik per bulan, tanpa mekanisme tender terbuka atau pelibatan pemerintah daerah (DetikNews, 16/4/2025). Penunjukan ini memperlihatkan keuntungan langsung yang diperoleh institusi militer, baik secara anggaran maupun pengaruh politik.

Dalam logika patronase, MBG bukan sekadar program gizi, tetapi juga alat konsolidasi kekuasaan dengan menjadikan aktor-aktor strategis sebagai pelaksana utama proyek populis negara. Selain itu, munculnya BGN dengan anggaran tinggi sejak awal juga menandakan upaya simbolik untuk tetap memelihara dukungan rakyat kecil, namun dengan wajah program yang dikendalikan lebih terpusat, tidak berbasis sistem kesejahteraan yang berlapis dan kompleks seperti bansos atau perlindungan sosial lainnya. Dalam logika patron-klien, hal ini justru memungkinkan kontrol yang lebih ketat dan relasi yang lebih langsung antara pemberi dan penerima manfaat, sehingga loyalitas politik bisa dibentuk dengan lebih terarah.

Perubahan pasca-efisiensi juga mempertegas arah ini, di mana fisiensi justru tidak berlaku merata. Kementerian yang dianggap strategis seperti Kemenhan, TNI, dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) hampir tidak tersentuh. Sementara kementerian di bidang pendidikan (yang kini terpecah dua), keuangan, dan pekerjaan umum mengalami pemangkasan cukup dalam. Dalam konteks politik anggaran, hal ini menunjukkan siapa yang dianggap penting dan siapa yang bisa dikorbankan. Patronase tidak hanya bekerja dalam relasi vertikal antara elite dan masyarakat, tetapi juga dalam relasi horizontal di antara lembaga negara. Dalam hal ini, mereka yang lebih dekat dengan kekuasaan atau dianggap fungsional bagi kelangsungan pemerintahan akan lebih diuntungkan.

Dengan demikian, distribusi anggaran dalam pemerintahan Prabowo-Gibran tidak hanya soal efisiensi atau pergeseran prioritas, tetapi juga tentang bagaimana kekuasaan dirawat melalui insentif fiskal. Alih-alih mengefektifkan anggaran demi peningkatan pelayanan publik secara merata, pemerintah tampaknya menggunakan efisiensi sebagai selubung untuk mendistribusikan kembali sumber daya ke kelompok dan institusi yang dianggap krusial dan strategis dalam menopang stabilitas politik dan kelangsungan rezim. Ini merupakan bentuk patronase versi baru, di mana tata kelola pemerintahan dan proses kebijakan dilaksanakan

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH
Jl. HOS. Cokroaminoto No 92, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310
Telepon: +6221 3158032
Email: contact@theindonesianinstitute.com

secara lebih terstruktur, lebih simbolik, dan dijalankan melalui kanal-kanal resmi negara, serta dilandaskan pada kelompok kepentingan tertentu dan kepentingan terkait yang dekat dengan kepentingan kekuasaan.

Dengan demikian, merujuk pada teori *Public Choice* (Breton, 1993; Grossman, 1994; Chohan, 2024), serta asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam UU 30/2014, dapat disimpulkan bahwa keputusan-keputusan fiskal strategis di era Prabowo–Gibran tidak semata-mata dilandasi oleh pertimbangan efisiensi ekonomi atau kemanfaatan publik secara universal. Sebaliknya, keputusan tersebut menunjukkan kecenderungan politisasi anggaran untuk merawat dukungan politik, mengkonsolidasikan kekuasaan, dan mengakomodasi kepentingan kelompok atau individu yang berada dalam lingkar kekuasaan.

Dalam konteks ini, tindakan pemerintah tampak sebagai bentuk rasionalitas politik yang mempertimbangkan insentif elektoral dan loyalitas elite, meskipun belum tentu memenuhi asas keterbukaan, ketidakberpihakan, dan kemanfaatan publik secara luas. Temuan studi ini memperlihatkan bahwa di balik narasi efisiensi dan reformasi, terdapat praktik patronase fiskal yang menyuburkan ketimpangan akses dan memperlemah transparansi kebijakan. Oleh karena itu, bagian selanjutnya mengeksplorasi lebih jauh bagaimana praktik patronase ini tercermin dalam pola distribusi anggaran kementerian dan proyek strategis nasional yang mengedepankan simbol ketahanan negara dibanding pemerataan kesejahteraan.

Kesimpulan

Kebijakan efisiensi anggaran pada era pemerintahan Prabowo-Gibran memperlihatkan adanya ketimpangan antara narasi penghematan fiskal dengan praktik implementatif di lapangan. Ketiadaan definisi yang jelas, indikator yang terukur, serta tujuan yang spesifik dalam Inpres 1/2025 menyebabkan kebijakan ini berpotensi digunakan secara lentur dan politis, bahkan berdampak langsung pada sektor-sektor esensial, seperti pendidikan, tanpa justifikasi yang transparan. Ketidaksiapan dalam komunikasi publik, serta lemahnya analisis situasi menandakan rendahnya sensitivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat terdampak.

Lebih jauh, inkonsistensi dalam pelaksanaan efisiensi anggaran, misalnya pengangkatan staf khusus di tengah pemangkasan beasiswa atau tunjangan dosen, memperlihatkan adanya ruang fleksibilitas yang tidak akuntabel. Situasi ini diperparah oleh struktur kabinet yang membesar dan berpotensi menambah beban anggaran, yang justru bertolak belakang dengan semangat efisiensi itu sendiri. Jika dibandingkan dengan praktik negara lain, seperti Argentina dan Amerika Serikat, efisiensi anggaran seharusnya diarahkan pada optimalisasi kelembagaan dan

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH
Jl. HOS. Cokroaminoto No 92, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310
Telepon: +6221 3158032
Email: contact@theindonesianinstitute.com

struktur pemerintahan, serta perbaikan pelayanan publik, bukan sekadar pemotongan program sosial.

Kondisi ini menggambarkan bahwa kebijakan efisiensi di bawah Prabowo-Gibran tidak sepenuhnya didorong oleh rasionalitas tata kelola anggaran, melainkan juga terjalin erat dengan pertimbangan politik dan kepentingan tertentu. Dari perspektif teori *Public Choice*, temuan studi ini menegaskan bahwa keputusan fiskal pemerintah cenderung dipengaruhi oleh insentif politik dan kepentingan aktor dominan, bukan oleh kepentingan publik yang netral dan objektif. Sementara, ditinjau dari Asas Umum Pemerintahan yang Baik, kebijakan ini telah gagal memenuhi prinsip keterbukaan, ketidakberpihakan, dan kemanfaatan, karena tidak disusun dan dijalankan secara transparan, inklusif, dan adil bagi seluruh warga negara.

Tanpa pembenahan dari sisi definisi, mekanisme pengawasan, evaluasi, dan keberanian untuk menyasar pos-pos anggaran non-esensial yang sesungguhnya membebani fiskal negara, maka kebijakan efisiensi hanya akan menjadi slogan politik dan menguntungkan kelompok elite tertentu, serta tidak menyentuh substansi perbaikan tata kelola dan prioritas pelayanan publik.

Rekomendasi

Berdasarkan temuan dan pembahasan di atas, studi ini mengajukan beberapa rekomendasi kebijakan sebagai berikut:

1. Kementerian Keuangan dan Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) perlu memperbarui *dashboard t*erbuka berbasis data spasial yang menampilkan distribusi dan alokasi anggaran secara rinci. Distribusi anggaran sering kali menjadi ruang kompromi politik antara elite dan kelompok kepentingan. Untuk mencegah pola patronase dan meningkatkan efisiensi, harus ada mekanisme transparansi yang *real-time*, merujuk pada prinsip Open Data (Open Data Watch, 2021), dan melibatkan publik, terutama dalam tahapan perencanaan dan pengawasan anggaran.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), khususnya Komisi XI yang membidangi urusan keuangan, perencanaan, pembangunan dan lain-lain, merevisi formula alokasi dana transfer dengan mempertimbangkan indikator kebutuhan dan kapasitas fiskal riil, bukan semata-mata karena pertimbangan historis atau politis. Jika terjadi alokasi yang tidak proporsional ke kementerian/lembaga tertentu karena afiliasi politik atau kepentingan, maka perlu ada reformasi mekanisme distribusi, yang diikuti

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH
Jl. HOS. Cokroaminoto No 92, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310
Telepon: +6221 3158032
Email: contact@theindonesianinstitute.com

mekanisme pengawasan dan tindak lanjut terhadap pemerintah secara efektif dan berdampak.

3. Untuk menjaga agar kebijakan fiskal tidak dikuasai oleh elite politik atau kelompok kepentingan, Presiden harus mengoptimalkan peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dapat menilai apakah kebijakan anggaran (terutama belanja dan subsidi) konsisten dengan prinsip efisiensi dan kepentingan publik.

Daftar Pustaka

Sumber Buku dan Jurnal Akademik

Breton, A. (1993). *Theories of Public Choice: A Primer*. Cambridge University Press.

Chohan, U. (2024). *Political Economy of Budgeting in The Global South*. Palgrave Macmillan.

Grossman, P. J. (1994). *A Political Theory of Intergovernmental Grants*. Public Choice, 78(3–4), 295–303.

Mueller, D. C. (2003). *Public Choice III*. Cambridge University Press.

Schlogl, L. (2020). *The Political Economy of Fiscal Policy in Fragmented Democracies.* OECD Development Centre Working Papers, 487.

Sumber Berita dan Laporan Media

ap.org. (24 Desember 2024). “Argentina's Milei Slashes Government Workforce”. https://ap.org

BBC Indonesia. (10 Januari 2025). “Proyek Rumah Rakyat dan Pengaruh Negara Asing”. https://www.bbc.com/indonesia

Buenos Aires Times. (17 Januari 2025). “Argentina Records Fiscal Surplus Under Milei”. https://www.batimes.com.ar

CNBC Indonesia. (4 Juni 2025). Sri Mulyani beberkan program ratusan triliun Prabowo, ini daftarnya. CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com

CNN Indonesia. (10 Desember 2024). “Food Estate Tetap Dilanjutkan, Kata Hashim”. https://www.cnnindonesia.com

DetikNews. (16 April 2025). “71 Dapur Lapangan MBG Dikelola TNI AD”. https://news.detik.com

Government Executive. (9 April 2025). “Trump’s Government Efficiency Department Led by Musk Starts Mass layoffs”. https://www.govexec.com

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH
Jl. HOS. Cokroaminoto No 92, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310
Telepon: +6221 3158032
Email: contact@theindonesianinstitute.com

Kalimantan.bisnis.com. (30 Oktober 2023). “IKN dan Ancaman Ekosistem di Balikpapan”. https://kalimantan.bisnis.com

Katadata. (11 September 2023). “Anggaran Badan Gizi Nasional Lampaui Kementerian Lama”. https://katadata.co.id

Kompas.com. (5 Februari 2024). “Sri Mulyani Pangkas TKD Rp50,59 Triliun”. https://www.kompas.com

Kompas.com. (25 februari 2025). “Prabowo Alokasikan Efisiensi Untuk MBG dan Investasi”. https://www.kompas.com

Kompas.com. (3 Maret 2025). “77 PSN Baru Ditandatangani Prabowo”. https://www.kompas.com

Kompas.com. (24 April 2025). “Dapur MBG Kalibata Berhenti Beroperasi, Mitra Rugi Rp1 Miliar”. https://www.kompas.com

Kompas.com. (5 Mei 2025). “Pemerintah Klaim MBG Berhasil 99,99 Persen”. https://www.kompas.com

Kumparan. (12 Februari 2025). “Anggaran Polri Dipotong Rp20,5 Triliun”. https://kumparan.com

Open Data Watch. (14 Desember 2021). “2021: A Transformative Year for Open Data Watch”. Open Data Watch.https://opendatawatch.com

Reuters. (17 Januari 2025). “Argentina Cuts Ministries to Fix Budget”. https://www.reuters.com

Suara.com. (11 Februari 2025). “Deddy Corbuzier Jadi Staf Khusus Menhan Sjafrie”. https://www.suara.com

Tempo.co. (27 November 2024). “COP29 Kritik Proyek Food Estate Indonesia”. https://www.tempo.co

Tempo.co. (9 Februari 2025). “TNI Bangun 300 Dapur Umum Untuk MBG”. https://www.tempo.co

Tempo.co. (10 Februari 2025). “Kementerian yang Tidak Kena Pemangkasan Anggaran”. https://www.tempo.co

Tempo.co. (15 Mei 2025). “TNI Rekrut 24 Ribu Personel untuk Berbagai Fungsi Sipil”. https://www.tempo.co

Tempo.co. (21 Oktober 2024). “Struktur Kabinet Prabowo-Gibran Lebih Gemuk Dari Sebelumnya”. https://www.tempo.co

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Jl. HOS. Cokroaminoto No 92, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310
Telepon: +6221 3158032
Email: contact@theindonesianinstitute.com

Sumber Wawancara

Dede Puji Setiono. (20 Februari 2025). Wawancara dalam diskusi Initiative! The Indonesian Institute [Dosen Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik, FISIPOL UGM].

Ni Made Dwipanti Indrayanti. (20 Maret 2025). Paparan dalam The Indonesian Forum Seri ke-118 mengenai pelaksanaan efisiensi anggaran di daerah. [Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)]

Ninasapti Triaswati. (20 Maret 2025). (20 Maret 2025). Paparan dalam The Indonesian Forum Seri ke-118 mengenai pelaksanaan efisiensi anggaran di daerah. [Ekonom, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia].

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Jl. HOS. Cokroaminoto No 92, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310
Telepon: +6221 3158032
Email: contact@theindonesianinstitute.com

Profil Penulis



Felia Primaresti (Felia) adalah Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) sejak tahun 2025. Ia adalah lulusan S1 Manajemen dan Kebijakan Publik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada (UGM), yang menyelesaikan studinya pada tahun 2022. Selama masa kuliah, Felia aktif terlibat dalam berbagai proyek penelitian di UGM, termasuk bersama PolGov (Research Centre for Politics and Government), dengan fokus pada metode riset big data.

Selain itu, Felia juga berkontribusi dalam proyek hibah penelitian bersama Rutgers Indonesia yang membahas isu-isu gender melalui perspektif agama. Sebelum bergabung dengan The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Felia memiliki pengalaman dalam pengelolaan dan manajemen proyek penelitian sebagai Project Manager Intern di sebuah startup penyedia layanan manajemen riset yang berbasis di Yogyakarta.

Selama di TII, Felia aktif mengkaji berbagai isu kebijakan, terutama yang berkaitan dengan politik perempuan, politik gender, demokrasi, pemilu, politik anak muda, serta politik dan agama. Felia juga terlibat dalam penelitian TII tentang evaluasi Peraturan Bersama Menteri (PBM) Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadat (2024). Ia juga terpilih sebagai peserta dalam program Young Progressive Academy (YPA) Batch 3, yang diselenggarakan oleh Friedrich Ebert Stiftung (FES) Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH
Jl. HOS. Cokroaminoto No 92, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310
Telepon: +6221 3158032
Email: contact@theindonesianinstitute.com

Profil Lembaga

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. TII merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

Visi TII adalah terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan penegakan hukum, serta melibatkan partisipasi beragam pemangku kepentingan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Misi TII adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia. TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, TII memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh TII meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi TII antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja (*working group*), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial mingguan (Wacana), Instagram *Live Series* dan *Space* Twitter (Policy Talks dan Initiative!), *podcast* kebijakan di Spotify (Ngobrol Kebijakan/Ngobi), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia dalam bahasa Indonesia dan The Indonesian Update, dalam Bahasa Inggris), kajian kebijakan tengah tahun (*Policy Assessment*), laporan tahunan (*Indonesia Report*), serta forum diskusi bulanan (The Indonesian Forum).

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH
Jl. HOS. Cokroaminoto No 92, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310
Telepon: +6221 3158032
Email: contact@theindonesianinstitute.com